

PENILAIAN AFEKTIF DALAM PEMBELAJARAN PPKn TINGKAT SMA: PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI GURU

Dwi Riyanti¹⁾, Ary Purwantiningsih²⁾, Toba Sastrawan Manik³⁾

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka

Email: dwiriyanti@ecampus.ut.ac.id

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka

Email: ary@ecampus.ut.ac.id

³Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Email: tobasastrawanmanik@ptki.ac.id

ABSTRAK

Penilaian Afektif adalah salah satu aspek yang ditekankan dalam setiap kurikulum. Dalam pembelajaran PPKn, Penilaian Afektif tidak terpisahkan seiring dengan tujuan pembelajaran PPKn yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang berkarakter dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan persepsi dan implementasi guru. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan guru sebagai subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini tiga guru SMK Swasta Budi Agung Medan, SMA Negeri 1 Tanah Masa (Nias), dan MAN Batubara. Data dikumpulkan dengan melakukan angket *Googleform*, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini ialah guru memahami pentingnya penilaian afektif terhadap siswa; guru telah mengimplementasikan penilaian afektif dengan dua metode yakni observasi dan penilaian diri. Penilaian dilakukan setiap pembelajaran berlangsung, akhir materi pembelajaran, dan tergantung pada Buku Guru. Guru belum mengembangkan instrumen sendiri dan menggunakan apa yang disediakan dalam Buku Guru. penelitian ini perlu untuk diteliti lebih mendalam agar kesulitan guru-guru dalam penilaian afektif bisa digali lebih mendalam.

Kata Kunci: Penilaian afektif; Pembelajaran PPKn.

ABSTRACT

Affective Assessment is one aspect that is emphasized in every curriculum. In learning PPKn, Affective Assessment is inseparable along with the learning objectives of PPKn which aim to create citizens who are of character and under the values of Pancasila. The purpose of the study is to describe affective assessments in the teaching of PPKn per the perception and implementation of teachers. The study was conducted with a qualitative approach and the teacher as the research subject. The subjects in this study were 3 teachers from the Medan Agung Private Vocational School, State High School 1 Tanah Masa (Nias), and MAN Batubara. Data were collected by conducting Google form questionnaires, documentation, and semi-structured interviews. The results of this study are the teacher understands the importance of affective assessment of students; The teacher has implemented affective assessment with two methods namely observation and self-assessment. The assessment is done every time the learning takes place, the end of the learning material, and depends on the Teacher's Book. The teacher has not yet developed his instruments and uses what is provided in the Teacher's Book. this research needs to be examined more deeply so that the difficulties of teachers in affective assessment can be explored deeper.

Keywords: Affective assessment; Civics Learning

PENDAHULUAN

Penilaian (*assessment*) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Pembelajaran yang baik tidak hanya pembelajaran yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana namun juga pembelajaran yang memiliki kriteria dan bentuk penilaian yang jelas. Penilaian harus menjadi yang utama dan terutama dalam mendukung proses pembelajaran (Black & William, 2006). Guru perlu untuk melakukan penilaian agar guru bisa mengambil keputusan (Anderson, 2003). Keputusan guru tersebut ialah apakah siswa mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, siswa berhasil, atau tidak. Keputusan yang diambil harus jelas, terukur, dan memiliki sistem yang jelas sehingga diperlukan upaya dan bentuk penilaian yang harus dirancang sebaik mungkin.

Selain itu, asesmen juga bisa menjadi sebuah motivasi dalam pembelajaran (Harlen, 2005). Keputusan-keputusan yang diambil guru melalui penilaian secara tidak langsung dorongan untuk guru meningkatkan atau mempertahankan bahkan mengevaluasi pembelajaran yang diberikan atau peserta didik. Tidak hanya memotivasi guru namun juga bagi siswa untuk meningkatkan atau mempertahankan proses pembelajaran yang telah diikuti. Sehingga siswa bisa menilai sendiri terhadap proses dan progress belajarnya.

Wragg (2001) secara lebih luas mengatakan bahwa tujuan penilaian ialah untuk melihat hasil secara pengetahuan (*feedback*), dukungan dan dorongan, motivasi, diagnose, serta seleksi, pengukuran dan perbandingan. Penekanan Wragg di atas menekankan bahwa proses penilaian adalah proses yang inheren, kompleks, dan sangat berdampak terhadap keberhasilan pembelajaran bagi guru maupun siswa bahkan pendidikan nasional secara umum. Oleh karena itu, idealnya dalam penilain tersebut, hasil suatu penilaian hendaknya harus bisa memberikan gambaran yang jelas bagi

siswa tentang progress dan pencapaian mereka serta mendorong mereka harus berimprovisasi (Marzano, 2006).

Penilaian terbagi dalam beberapa aspek yakni kognitif, afektif, dan *psikomotorik*. Penilaian ketiga aspek seyogyanya dilakukan secara berimbang dan saling melengkapi. Ketiga ranah tersebut satu kesatuan dalam penilaian perilaku siswa (Noviansyah, 2020). Namun pada kenyataannya khususnya antara penilaian afektif dan kognitif terjadi ketidakseimbangan (H, 2019). Menurut McCoach et. al keberimbangan antara ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam proses pembelajaran oleh guru. "*The cognitive domain received much attention from educators as proponents and critics argued the merits and evils of behavioral objectives,*" (McCoach et al., 2013). Ketidakseimbangan tersebut akhirnya menempatkan pendidikan semata proses yang bersifat transfer pengetahuan sehingga bersifat materialistik dan saintifik semata. Sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan dianggap sebagai pelengkap sehingga terkadang masih dianggap sebagai pilihan (opsional) oleh guru.

Oleh karena itu, penilaian afektif yang sejatinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dianggap sebagai budaya baru dalam pendidikan. Lamban dan kurangnya perhatian terhadap penilaian afektif dalam beberapa kurikulum sebelumnya, sistem pendidikan seakan-akan harus belajar lagi untuk melaksanakan penilaian afektif dalam sistem pendidikan. Guru sebagai pelaksana proses pendidikan di sekolah harus belajar tentang pelaksanaan penilaian afektif, pihak pemerintah harus menyediakan instrument dan kebijakan penilaian afektif. Padahal, seyogyanya pelaksanaan penilaian afektif bukan proses dan budaya baru.

Penilaian afektif merupakan proses *conditio sine qua non* dalam praktik pendidikan. Hal ini didorong kesadaran bahwa pendidikan tidak bisa hanya dianggap bersifat proses transfer

pengetahuan atau proses dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan atau pembelajaran dalam kelas tidak boleh hanya proses mengubah dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga keberhasilan pendidikan disimpulkan antara pintar atau bodoh semata. Lebih dari itu, proses pembelajaran juga harus proses pembentukan karakter atau sikap. Maka penilaian antara aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*affective*), dan keterampilan (*psikomotorik*) harus dilakukan secara berimbang (Permendikbud No. 66 Tahun 2013). Sehingga hasil proses pendidikan setiap jenjang tidak hanya cerdas namun juga memiliki karakter yang baik sebagaimana diharapkan.

Sebegitu penting, Bloom dkk menegaskan bahwa antara pengetahuan dan sikap sulit untuk dibedakan. Antara pengetahuan dan sikap saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga pembelajaran yang hanya menilai aspek pengetahuan saja kurang memadai untuk menggambarkan hasil pencapaian hasil belajar siswa. Dengan lugas Bloom dkk mengatakan “*The fact that we attempt to analyze the affective separately from cognitive is not intended to suggest that there is a fundamental separation. There is none* (Krathwohl et al., 1964a).

Lebih lanjut Bloom dkk, menegaskan bahwa *attitude* (perilaku) terdiri atas tiga yakni pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), dan perilaku (*behavior*). Hubungan sikap dan pengetahuan misalnya hasil sikap akan membantu siswa untuk membentuk perasaan siswa terhadap konten dan isu, perasaan menghargai diri sendiri sehingga terlibat dalam beragam aktivitas (Krathwohl et al., 1964b). Tidak hanya dalam pengaruh terhadap hasil belajar, terhadap minat belajar siswa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah integrasi antara motivasi, afektif, dan kognitif siswa (Ainley, 2006). Hal ini mengafirmasikan bahwa hasil-hasil pembelajaran kognitif merupakan bagian dari kombinasinya dengan sikap dan perilaku. Hanya saja selama ini kurang

disadari sehingga tidak diperhatikan dan dinilai dalam bentuk penilaian yang serius, sistemik, dan terstruktur.

Afirmasinya ialah sikap dan pengetahuan saling menopang satu sama lain. Hal senada ditambahkan Boyd, Dooley, & Felton (2006) bahwa relasi antara bersifat timbal antara kognitif dan afektif yang mempengaruhi siswa dalam menginternalisasi ke dalam bentuk nilai, keyakinan, dan praksis siswa. Sekalipun harus diakui hubungan keduanya tidak dalam pengaruh secara langsung dan dipengaruhi oleh banyak variable (Helmke, 1989).

Sikap secara karakteristik menurut Anderson & Bourke (2000) terdiri atas tiga yakni intensitas, direksi (arah), dan target. Intensitas berkaitan dengan tingkatan perasaan yakni suka, cinta, sayang, dan lainnya. Direksi (*direction*) orientasi perasaan apakah negatif atau tidak, sedangkan target adalah objek atau aktivitas dimana perasaan diarahkan. Secara lebih luas dengan merangkum beragam pandangan, Gable, (1986) berpendapat bahwa karakteristik afektif terdiri atas *attitudes, self-concept, interests, and values*. *Attitude* berkaitan dengan persepsi terhadap objek, *self-concept* berkaitan dengan cara pandang individu terhadap dirinya, *interest* berhubungan dengan pilihan akan aktivitas yang diambil, dan *values* berkaitan dengan keyakinan dalam menentukan gaya dan tujuan hidup (Gable, 1986). Relatif sama dengan pendapat di atas, Menurut Boyd et al., (2006) domain afektif terdiri atas *interests, attitudes, values, and appreciation*.

Pembentukan watak atau sikap peserta didik secara khusus atau warga negara secara umum merupakan produk dari pembelajaran di sekolah. Gagné (1984) mengatakan setidaknya ada 5 variasi hasil dari pembelajaran yakni keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap. Berkaitan dengan sikap, Gagne mengakui bahwa kategori sikap merupakan

kesimpulan secara internal yang tidak bisa diamati secara langsung namun harus dinilai berdasarkan sikap yang ditunjukkan. Afirmasinya ialah guru tidak bisa mengabaikan atau menganggap sepele tentang perilaku atau sikap siswa dalam setiap pembelajaran. Guru sebisa mungkin harus membuat pengamatan dan penilaian terhadap sikap atau perilaku peserta didik secara kontinu, terstruktur, dan terencana.

Namun harus diakui bahwa penilaian aspek kognitif relatif dominan dan paling disukai guru. Untuk saat ini, model penilaian yang berlaku dalam mata pelajaran saat ini hanya menitikberatkan dalam ranah kognitif (Alifah, 2019). Menurut Tyler (1972) setidaknya ada alasan penilaian afektif tidak mendapatkan serius dari guru maupun kurikulum sekolah. Pertama ialah adanya anggapan bahwa afektif sebagai sebuah perasaan sehingga bukan menjadi urusan sekolah melainkan rumah dan rumah ibadah. Kedua ialah anggapan bahwa afektif merupakan hasil akhir dari pembelajaran kognitif yang tidak terpisahkan selama pembelajaran kognitif. Selain itu kesulitan untuk merumuskan penilaian juga menjadi kendala.

Menurut Kemdikbud (2017) berdasarkan monitoring 2014 bahwa 60% responden pendidik belum dapat merancang, melaksanakan, mengolah, melaporkan, dan memanfaatkan hasil penilaian dengan baik. Hal ini menjadi adagium umum bahwa ketika nilai kognitif tinggi maka linear dengan hasil afektif. Padahal hasil kedua ranah tersebut berbeda sekalipun saling mempengaruhi satu sama lain sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli yang telah diuraikan sebelumnya.

Dikotomi bahwa urusan sikap adalah bagian keluarga atau agama sedangkan urusan pengetahuan adalah urusan sekolah sepenuhnya tidak benar. Bagaimanapun juga, sekolah dan pembelajaran di kelas sebagai lingkungan sekaligus interaksi secara sosial memberikan dampak terhadap

pembentukan sikap siswa. Forman (1987) menegaskan bahwa aspek sikap siswa dan perkembangan sosial merupakan tugas utama sekolah yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang dapat berguna secara efektif di lingkungan sosial.

Dalam konteks (PPKn) pendidikan kewarganegaraan, penilaian sikap merupakan penilaian yang sangat penting jika tidak bisa dikatakan yang paling utama. Hal ini bisa dilihat dari komponen kurikulum pembelajaran PPKn itu sendiri. menurut Branson (1999) bahwa komponen pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) setidaknya harus memuat tiga komponen yakni *civic knowledge* (pengetahuan), *civic skills* (keterampilan) dan *civic disposition* (watak-watak kewarganegaraan). Hal yang lebih senada dikatakan oleh Bahmuller & Patrick (1999) bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif hendaknya mengkaji atau membedah 4 (empat) komponen dasar yaitu *knowledge of citizenship and government in democracy*, *cognitive skill of democratic citizenship*, *participatory skill of democracy*, *virtue of disposition of democratic citizenship*. Dengan kata lain, sikap atau perilaku adalah perhatian penting atau yang utama dalam proses pendidikan kewarganegaraan. Sehingga orientasi pendidikan kewarganegaraan tidak hanya fokus pada perkembangan atau hasil secara akademik namun lebih luas, komprehensif dan holistik dalam memandang individu sebagai peserta didik yang akan kembali ke masyarakat (Nanggala & Suryadi, 2022). Sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki beban atau tanggung jawab moral dalam mempersiapkan karakter warga negara yang sesuai dan dibutuhkan perkembangan jaman. Dalam konteks Indonesia, bertanggung jawab dalam mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan nilai, budaya, dan keadaban Pancasila (Lestari, 2021).

Penilaian afektif merupakan keniscayaan dalam pembelajaran di kelas.

Khususnya dalam pembelajaran PPKn, penilaian afektif lebih ditekankan dibandingkan mata pelajaran lainnya. Hal ini bisa dilihat bahwa tujuan PPKn menempatkan sikap kewarganegaraan sebagai tujuan pertama diikuti oleh pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan (Kemdikbud, 2016).

Dalam mata pelajaran PPKn, sikap yang diteliti ialah sikap spiritual dan sikap sosial. *Sikap spiritual* yang berhubungan dengan keyakinan, keimanan, dan ketakwaan. Artinya dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Terakhir adalah *sikap sosial* yakni berkaitan dengan karakter mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap dalam kapasitas hubungannya dengan manusia. Jadi, penekanan dua sikap tersebut merupakan upaya membangun keseimbangan rohani peserta didik antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Hal ini mendapat perhatian lebih di Indonesia dibandingkan negara-negara lain.

Penelitian lain yang relatif mirip dengan riset ini ialah penelitian yang dilakukan (Rizqiani & Wijayanti, 2022 dan Widiyanto & Istiqomah, 2020). Menurut Rizqiani dan Wijayanti berdasarkan penelitian di SMA Bumiayu Kabupaten Brebes ditemukan bahwa penilaian dalam pembelajaran PPKn oleh guru selama ini masih belum dilaksanakan sesuai prosedur dan masih menggunakan cara penilaian yang masih tradisional. Temuan lain ialah dalam perencanaan penilaian dalam pembelajaran PPKn tahap perencanaan masih terdapat instrumen yang tidak diuji validitas dan reabilitas (Widiyanto & Istiqomah, 2020).

Hal ini mengindikasikan bahwa guru dalam pembelajaran PPKn khususnya di kalangan SMA masih memiliki kesulitan dalam melaksanakan penilaian khususnya penilaian afektif. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penilaian afektif tingkat SMA-Sederajat di Sumatera Utara. Dalam rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa

pendapat guru tentang penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn? Bagaimana guru menerapkan penilaian afektif di sekolah? dan apa bentuk penilaian afektif yang sering digunakan guru?

METODE

Pendekatan yang digunakan penelitian ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif kualitatif karena Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka (kuantitatif) melainkan data tersebut berasal dari data-data, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Kurniati et al., 2018). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara kualitatif berupa perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya, secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J.Moleong, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan angket melalui *Googleform*, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Subjek dalam penelitian ialah 3 Guru (2 PNS dan 1 Honorer) PPKn tingkat SMA di Sumatera Utara dengan lokasi berbeda yakni SMK Swasta Budi Agung Medan, SMA Negeri 1 Tanah Masa (Kabupaten Nias), dan MAN Kabupaten Batubara. Pemilihan sekolah tersebut dilakukan dengan pertimbangan sekolah-sekolah tersebut telah menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013. Guru-guru yang menjadi subjek penelitian adalah guru-guru yang relatif muda dan paham tentang Kurikulum 2013 serta berpengalaman mengajar lebih dari 1 (satu) tahun di satu sekolah. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dikaji dari berbagai sumber relevan seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif model Miles & Huberman terdiri empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

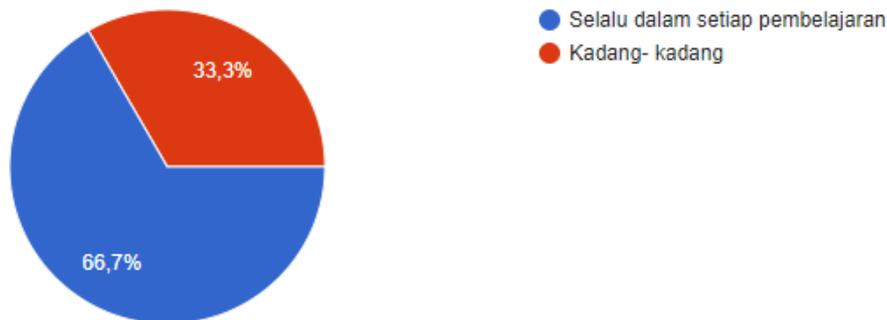
HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset ini memfokuskan pada persepsi dan implementasi penilaian afektif di kalangan guru SMA di Sumatera khususnya di tiga sekolah. Riset-riset penilaian dalam pembelajaran PPKn biasanya dilakukan dalam bidang penilaian kognitif. Penelitian tentang penilaian kognitif sudah sangat banyak dilakukan khususnya jika dikaitkan dengan *High Order Thinking Skills* (HOTS).

Penelitian ini relatif mirip dengan penelitian disertasi yang dilakukan oleh Nia Marniati (2018). Marniati dalam abstraknya menyimpulkan bahwa bahwa guru tidak merencanakan instrumen penilaian afektif dalam RPP, sehingga tidak melakukan pencatatan/penilaian kompetensi afektif peserta didik pada instrumen penilaian sesuai dengan ketentuan dalam PBM. Hal ini menurutnya disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi guru diantaranya

: guru kurang mampu mengembangkan instrumen penilaian afektif, jumlah siswa yang banyak dan waktu yang sedikit sehingga guru tidak mengisi lembar/ instrumen penilaian afektif dalam PBM, dan sebagainya (Marniati, 2018). Relatif sama dengan penelitian tersebut, penelitian mencoba mengeksplorasi lebih jauh dengan meneliti di 3 sekolah di Sumatera.

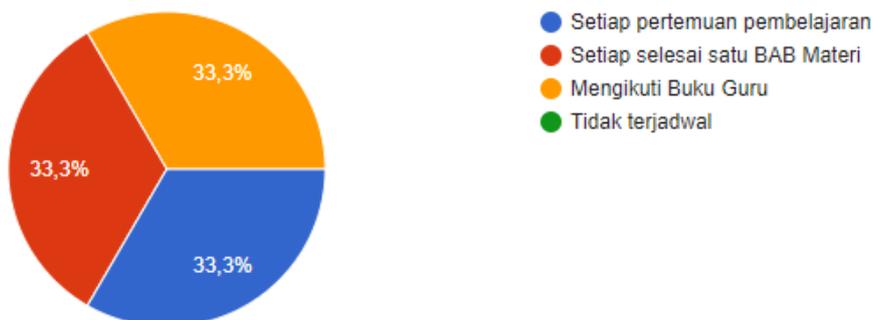
Setelah melakukan serangkaian proses penelitian dan pengkajian, Penelitian ini menemukan bahwa guru tingkat SMA sederajat dalam penelitian ini memahami penilaian afektif penting diterapkan dalam pembelajaran PPKn. Guru-guru telah menerapkan penilaian efektif selama dalam proses pembelajaran. Frekuensi penilaian afektif, hanya 1 (satu) responden yang melaksanakan kadang-kadang. Selebihnya, responden menyatakan selalu menerapkan penilaian afektif setiap pembelajaran.



Gambar 1. Frekuensi penerapan Penilaian Afektif

Pelaksanaan penilaian afektif cukup beragam. Ada yang melakukan setiap

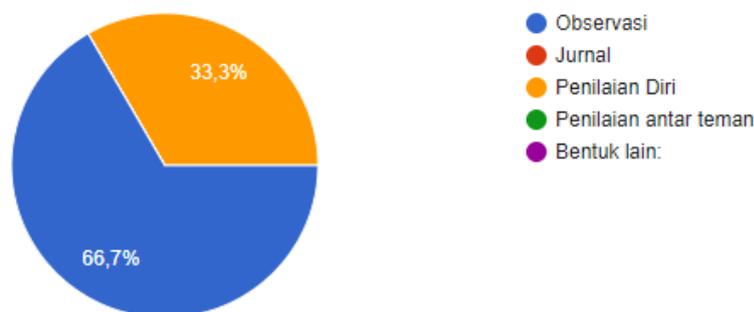
akhir pembelajaran, setiap pertemuan, dan tergantung pada Buku Guru.



Gambar 2. Waktu pelaksanaan Penilaian Afektif

Bentuk penilaian afektif yang digunakan adalah dominan pada observasi sedangkan selebihnya menggunakan penilaian diri.

Dalam melakukan penelitian ini, ada guru yang menggunakan panduan sendiri dan atau menggunakan Buku Guru.



Gambar 3. Bentuk Penilaian Afektif

Secara umum guru menganggap bahwa tidak ada kesulitan dalam menerapkan penilaian afektif. Namun, menurut salah satu responden perlu perbaikan dalam rubrik penilaian. Ketiadaan kesulitan ini disebabkan karena guru mengikuti secara total dari buku pegangan yang disediakan. Buku Pegangan Guru yang dibagikan oleh Pemerintah kepada setiap guru telah menyediakan bentuk penilaian serta indikator-indikator yang bisa dijadikan acuan oleh guru.

Kurikulum 2013 membawa banyak perubahan dalam paradigma dunia pendidikan Indonesia. Perubahan paling esensial adalah perubahan pendekatan dalam pembelajaran yakni pendekatan secara saintifik dan penilaian berbasis autentik yang menekankan proses ketimbang hasil (Subandi, 2014). Perubahan pendekatan dan penilaian ini kemudian membawa banyak implikasi dalam pembelajaran dan penilaian di kelas termasuk PPKn khususnya proses penekanan terhadap penilaian sikap yang pada kurikulum sebelumnya kurang mendapat perhatian serius.

Oleh karena itu, guru diharuskan melaksanakan penilaian afektif dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu menarik untuk diteliti dan dikaji bagaimana guru akan melaksanakannya seiring dengan meningkatkan dorongan dan pengutamaan penilaian afektif. Khususnya dalam

pembelajaran PPKn, penilaian afektif sangat relevan dan penting untuk diamati dan dikaji secara mendalam.

Dalam Kurikulum saat ini penilaian afektif mendapatkan perhatian serius. Penilaian afektif perlahan-lahan mulai disetarakan dengan penilaian kognitif yang sebelumnya menjadi perhatian utama proses pembelajaran di kelas. Hal ini merupakan bentuk rekognisi dan afirmasi bahwa penilaian afektif tidak bisa diabaikan dari proses pendidikan di Indonesia.

Secara filosofis, menurut Mardiana & Suyata, (2017) ada 6 (enam) landasan filosofis dari Kurikulum 2013 yakni (a) Pembentukan dan pengembangan sikap kebangsaan dan karakter atau nasional, (b) pengembangan kurikulum berdasarkan budaya nasional, (c) Pertimbangan realitas bahwa pendidikan telah menjadi proses mengembangkan potensi peserta belajar, (d) Pertimbangan berdasarkan fakta bahwa pendidikan telah didasarkan pada budaya dan pengalaman bangsa di masa lalu, (e) Pendasaran realitas bahwa pendidikan telah menjadi dasar kelangsungan hidup bangsa dan (f) Mengacu pada kenyataan itu pendidikan telah disesuaikan dengan kehidupan peserta pembelajaran sebagai individu, masyarakat anggota dan warga negara. Hal ini menurut Mardiana & Suyata, (2017) merujuk pada beberapa

pandangan filosofis yakni perenialisme, (b) esensialisme, (c) progresifisme (d) pragmatisme, (e) eksistensialisme dan (f) rekonstruktisme.

Hal senada ditegaskan oleh Faris (2015) bahwa Kurikulum 2013 dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat yang dalam istilahnya disebut dengan ekletif inkoorporatif. Namun berbeda dengan Ardiana dan Suyata, Al Faris menekankan bahwa aliran filsafat Progresivisme merupakan aliran yang lebih dominan dalam Kurikulum 2013 dengan tiga alasan yakni penekanan peserta didik sebagai subjek, guru sebagai fasilitator, dan mata pelajaran yang bersifat terintegrasi.

Di antara berbagai perubahan dan penekan tersebut, Penilaian afektif merupakan bagian yang menarik dan substansial. Penilaian afektif mendapatkan penekanan baru dan kuat yang diperkenalkan dalam Kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Khususnya dalam pembelajaran PPKn, penilaian sikap merupakan yang terutama. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013 yakni Kompetensi Spiritual (KI 1), Kompetensi Sosial (KI 2), Kompetensi Pengetahuan (KI 3), dan Kompetensi Keterampilan (KI4). Penambahan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial merupakan kompetensi-kompetensi belum diperhatikan dan diuraikan secara jelas dan terstruktur dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran PPKn di Indonesia di semua jenjang pendidikan di Indonesia.

Hal ini secara implisit dikuatkan oleh landasan filosofis K 13 yang menekankan pentingnya penguatan sikap karakter bangsa dan nasional. Hal ini kemudian ditegaskan lagi oleh Kemdikbud (2016) bahwa secara umum tujuan PPKn terdiri atas 3 (tiga) yaitu sikap kewarganegaraan termasuk di dalamnya komitmen, keteguhan, dan tanggung jawab (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk

kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*). Kompetensi sikap seyogya sudah menjadi perhatian dan penekanan penting pendidikan kewarganegaraan baik secara teoritis maupun praktis kontemporer.

Jika merunut dari komposisi Kompetensi-Kompetensi Inti yang disusun dalam K 13, maka kompetensi Inti Spiritual dan Kompetensi Inti Sosial terintegrasi dalam sikap kewarganegaraan. Penekanan sikap yang merupakan integrasi dari spiritual dan sosial menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selain menekankan pentingnya kompetensi individual namun juga menyeimbangkan kompetensi sosial. Afirmasinya, penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn tidak hanya menilai peserta didik secara individu namun juga dalam konteks hubungannya dengan peserta didik lain. Hal ini senada dengan yang ditegaskan Allen dan Friedman bahwa dalam membantu siswa mampu bersosialisasi, maka pendidikan harus bersifat komprehensif dan tidak bisa bersifat kognitif semata (Allen & Friedman, 2010).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru PPKn menyadari urgensi dan relevansi penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn. Penerapan penilaian afektif dalam PPKn dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengetahui karakter siswa. Guru telah berupaya untuk melaksanakan penilaian afektif. Namun, harus diakui bahwa penilaian afektif belum sepenuhnya terorganisir dan terstruktur dengan baik. Masih banyak guru kesulitan dalam melakukan penilaian di Kurikulum 2013, terutama dalam penilaian sikap (Setiadi, 2016). Sehingga banyak guru yang melaksanakan penilaian afektif hanya seadanya.

Sehingga menurut Ulumudin & Fujianita (2019) berdasarkan penelitiannya pada tingkat sekolah dasar, penilaian afektif atau *attitude assesment* mulai dari perencanaan, implementasi bahkan hingga tahap *follow up* belum optimal. Hal ini

ditandai dengan ketergantungan pada Buku Guru yang disediakan pemerintah. Hal ini senada dengan temuan Kemdikbud (2017) bahwa 60% responden pendidik belum dapat merancang, melaksanakan, mengolah, melaporkan, dan memanfaatkan hasil penilaian dengan baik. Paradigma guru yang masih tradisional, masih menganggap penilaian hanya pada hasil belajar bukan pada proses pembelajaran. Dalam penilaian Kurikulum 2013 memuat tiga penilaian yang terdapat aspek-aspek didalamnya. Kurangnya pemahaman guru tentang penilaian Kurikulum 2013 membuat sistem penilaian kurang maksimal dalam implementasinya (Effendi et al., 2021).

Hal ini senada dengan temuan dalam penelitian ini. Buku Guru sekali pun telah menyediakan format, rubrik, dan bentuk penilaian, namun masih sangat bersifat general dan minimalis sehingga diperlukan kreativitas guru dalam mengembangkannya. Hal ini mengafirmasikan bahwa masalah penilaian afektif masih menjadi kendala dan tantangan di dalam kelas tidak hanya secara praktis namun juga teoritisasi

penilaian afektif dalam bentuk indikator perilaku akan dinilai oleh guru.

Hal ini menekankan bahwa penilaian afektif tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada berbagai hal kendala dan tantangan di lapangan yang dihadapi oleh guru. Berbeda dengan penilaian kognitif yang relatif mudah karena bisa dikonversikan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui serangkaian tes. Penilaian afektif diharapkan bersifat kualitatif sehingga sebisa mungkin dihindarkan dari kuantifikasi-kuantifikasi dalam bentuk angka-angka.

Dalam penilaian afektif tersedia beberapa metode yang biasa digunakan oleh guru. Penggunaan metode penilaian diri dan observasi yang diterapkan guru dalam penelitian ini merupakan pilihan yang baik. Hal senada ditegaskan oleh Anderson & Bourke (2000) observasi dan penilaian diri merupakan metode yang bisa diterapkan untuk melihat karakter. Namun, kedua metode tersebut memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri sebagaimana termuat dalam tabel 1. berikut.

Tabel 1. Hubungan metode Observasi dan Penilaian Diri

Table 3.1 The Relation Between Methods of Gathering Information and Possible Problems in Using the Methods to Gather Information	
<i>Methods of Gathering Information</i>	<i>Possible Problems in Using the Methods to Gather information</i>
Observational Methods (e.g., systematic behavioral observation, applied performance testing)	Failure to observe relevant characteristics or relevant indicators of those characteristics
Self-Report Methods (e.g., paper-and-pencil achievement tests, questionnaires, interviews)	Misinterpretation of what is observed Inaccurate or incorrect information because the wrong question was asked Misinformation provided by respondent, either intentionally or accidentally

Dalam penggunaan metode observasi, untuk memaksimalkan kualitas penilaian maka penilaian afektif dengan observasi harus dilakukan dengan durasi waktu yang panjang dan dilakukan dalam beberapa situasi. Hal ini belum ditemukan dalam penelitian ini mengenai frekuensi guru dalam melaksanakan penilaian sikap melalui bentuk observasi. Penilaian afektif metode observasi dengan satu kali atau dalam satu situasi, maka penilaian akan sia-sia (Anderson & Bourke, 2000). Artinya diperlukan kontinuitas dan konsistensi yang relatif jika penilaian afektif dilakukan dalam bentuk metode observasi. Penilaian afektif dengan metode observasi harus mempertimbangkan dua hal yakni jenis atau karakteristik afektif yang diobservasi harus jelas dan afektif yang diobservasi harus relevan, (Anderson & Bourke, 2000).

Kejelasan dan relevansi ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan Kompetensi Sosial dan Kompetensi Spiritual yang ada dalam setiap topik pembelajaran.

Hal ini yang belum ditemukan dalam penilaian afektif oleh guru. Nilai-nilai yang diobservasi masih terlalu bersifat umum dan luas. Jika melihat dalam Buku Pegangan Guru sebagaimana yang dijadikan acuan guru di dalam kelas, maka sikap yang dinilai guru setiap guru sangat general dan luas. Dengan kata lain, jika guru hanya mengikuti dari Buku Pegangan Guru, relevansi dan kejelasan sikap yang dinilai masih terlalu sangat umum. Hal ini menjadi kendala sekaligus tantangan bagi guru jika menggunakan metode observasi. Hal ini bisa dilihat dalam rubrik yang disediakan dalam Buku Pegangan Guru di bawah berikut.

LEMBAR PANDUAN OBSERVASI

Petunjuk

- Lembar observasi ini diisi oleh guru pada saat pelaksanaan pembelajaran.
- Observasi terhadap peserta didik dilaksanakan selama 1 (satu) semester.
- Guru dapat menentukan satu atau beberapa aspek sebagai indikator dalam pelaksanaan observasi.

Nama Sekolah :
 Kelas :

No	Nama Peserta Didik	Sikap Spiritual dan Sosial											Deskripsi
		1. Jujur	2. Toleran	3. Menghargai	4. Kerja sama	5. Disiplin	6. Tg. Jawab	7. Proaktif	8. Responsif	9. Damai	10. Gt. Royong	11. Peduli	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
dst													

Gambar 4. Panduan Penilaian Observasi Kurikulum 2013

Sangat kurang logis dan autentik untuk mendapatkan hasil afektif sikap jujur, toleran, menghargai, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, pro aktif, damai, gotong-royong, dan peduli dalam satu waktu penilaian. Jika menggunakan observasi maka agar lebih autentik dan holistik diperlukan proses penilaian afektif yang panjang dan berkesinambungan.

Bentuk penilaian afektif yang banyak disarankan dan digunakan dalam dunia pendidikan adalah penilaian sendiri (*self assessment*). Salah satu prinsip penilaian yang harus dilakukan guru agar lebih efektif adalah pelibatan individu dalam penilaian diri (*self assesment*) (Singer et al., 2003). Kelebihan dan peluang dari metode penelitian ini adalah pelibatan peserta didik sebagai sumber informasi dan evaluasi terhadap sikapnya sendiri.

Ada dua metode penilaian yang lazim digunakan dalam penilaian diri yakni kuesioner dan interviu (Anderson & Bourke, 2000). Kedua bentuk penilaian ini memang memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Harapannya, hasilnya lebih autentik dan adil sesuai dengan prinsip penilaian yang harus ditekankan. Autensitas dan keadilan ini diharapkan membantu guru dalam membantu perkembangan sikap peserta didik.

Namun berdasarkan hasil penelitian ini, Guru lebih sering menggunakan kuesioner dimana guru memberikan format penilaian yang akan diisi oleh siswa. Perbandingan keduanya diringkas dalam gambar berikut. Kuesioner memang relatif cepat dan mudah diterapkan oleh guru.

Table 3.2
Comparison of Questionnaires and Interviews as Self-Report Measures

Advantage	Questionnaire	Interview
Standardization	Responses are readily coded in a standardized way.	Responses are more idiosyncratic and thus less amenable to coding.

Administration Convenience	Can be completed by large groups simultaneously or by mail or e-mail.	One-to-one administration whether in person or by telephone.
Length	Limited by age and interest of respondents from 40 to 60 questions at the most.	Limited in the same way perhaps from 20 minutes to perhaps 1 hour.
Depth/Breadth	Mostly limited to structured questions previously developed.	Can move into other areas or for more details, as appropriate.

Gambar 5. Perbandingan Kuesioner dan Wawancara dalam Penilaian Diri

Penilaian dengan kuesioner lebih praktis dibandingkan wawancara. Keterbatasan waktu yang dimiliki guru menjadi alasan kenapa guru lebih suka menerapkan metode kuesioner. Namun, dalam keadaan tertentu wawancara juga digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang afektif siswa. Namun hal ini biasanya apabila hasil dari kuesioner ditemukan hal yang aneh atau dianggap bukan biasa. Hasil-hasil penilaian diri metode kuesioner bisa dijadikan temuan awal untuk menindaklanjuti dalam bentuk wawancara (wawancara). Kombinasi antara kuesioner dan wawancara sangat menarik jika dilakukan namun sangat membutuhkan waktu yang lebih panjang. Sehingga wawancara sebagai konfirmasi atau penggalan terhadap hasil kuesioner

Kompleksitas dan banyaknya komponen yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode penilaian afektif, sangat logis ada kesulitan yang dialami guru dalam penilaian afektif. Sikap yang dinilai yang relatif jamak, indikator yang kurang detail, dan waktu pelaksanaan yang cukup lama menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas penilaian afektif. Pilihan untuk mengikuti Buku Guru yang disediakan menjadi alternatif pilihan. Namun, penilaian akan kurang berkualitas dan kurang memberikan data yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk mengevaluasi guru, pembelajaran, atau siswa. Akhirnya, penilaian afektif kurang mampu dan dianggap belum sepenuhnya berkontribusi dalam proses pendidikan secara umum. Dalam konteks kurikulum saat ini dibandingkan sebelumnya, penilaian afektif lebih terbuka dan diperhatikan namun secara substansial masih kurang dievaluasi dan diimplementasikan secara serius dan mendalam.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini ialah guru-guru PPKn menyadari pentingnya penilaian afektif dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru telah menerapkan

penilaian afektif siswa dalam pembelajaran PPKn. Bentuk penilaian afektif yang sering dilakukan ialah melalui metode observasi dan dokumentasi. Implementasi penilaian afektif siswa cukup beragam yakni ada yang melakukan setiap kali pertemuan, setiap akhir Pembelajaran, dan mengikuti Buku Guru. Namun implementasi penilaian afektif perlu ditingkatkan lagi agar lebih terstruktur dan tersistematis. Penilaian afektif harus lebih dipersiapkan, direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara berkesinambungan. Guru perlu untuk mengembangkan penilaian afektif secara kreatif dan efektif sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada Buku Pegangan Guru yang disediakan pemerintah. Prinsip observasi dan penilaian diri dalam penilaian afektif membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang terorganisir. Kendala penilaian afektif oleh guru masih ditemukan dan perlu sosialisasi serta pengembangan kompetensi guru untuk melakukan penilaian afektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainley, M. (2006). Connecting with learning: Motivation, affect and cognition in interest processes. *Educational Psychology Review*, 18(4), 391–405. <https://doi.org/10.1007/s10648-006-9033-0>
- Alifah, F. N. (2019). Pengembangan Strategi Pembelajaran Afektif. *Tadrib*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v5i1.2587>
- Allen, K. N., & Friedman, B. D. (2010). Affective learning : A taxonomy for teaching social work values Affective learning : A taxonomy for teaching social work values. *Journal of Social Work Values and Ethics*, 7(2), 1–12.
- Anderson, L. W. (2003). Classroom assessment: Enhancing the quality of teacher decisionmaking. In *Classroom Assessment*. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. <https://doi.org/10.4324/9781410607140>

- Anderson, L. W., & Bourke, S. F. (2000). Assessing affective characteristics in the schools, second edition. In *Assessing Affective Characteristics in the Schools, Second Edition*. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. <https://doi.org/10.4324/9781410605443>
- Bahmuller, C. F., & Patrick, J. J. (Eds.). (1999). *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Projects*. Indiana University.
- Black, P., & William, D. (2006). Assessment for Learning in the Classroom. In J. Gardner (Ed.), *Assessment and Learning*. SAGE Publications.
- Boyd, B. L., Dooley, K. E., & Felton, S. (2006). Measuring Learning In The Affective Domain Using Reflective Writing About A Virtual International Agriculture Experience. *Journal of Agricultural Education*, 47(3), 24–32. <https://doi.org/10.5032/jae.2006.03024>
- Branson, M. S. (1999). *Belajar “Civic Education” dari Amerika*. LKis Yogyakarta.
- Effendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi penilaian pembelajaran pada Kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah. *Prabayaksa : Journal of History Education*, 1(1), 21–25.
- Faris, F. Al. (2015). Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 316–338.
- Forman, S. G. (1987). Affective and social interventions in the schools. *Special Services in the Schools*, 3(3-4), 1-4. https://doi.org/10.1300/J008v03n03_01
- Gable, R. K. (1986). *Instrument Development in Affective Domain*. Springer Science+Business Media.
- Gagné, R. M. (1984). Learning outcomes and their effects: Useful categories of human performance. *American Psychologist*, 39(4), 377–385. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.4.377>
- H, S. (2019). The implementation of affective domain assessment in elementary school. Dalam E. Retnowati, A. Ghufron, Marzuki, Kasiyan, A. C. Pierawan, & Ashadi (Eds.), *Character Education for 21st Century Global Citizens* (pp. 607–614). Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.1201/9781315104188-65>
- Harlen, W. (2005). Teachers’ summative practices and assessment for learning – tensions and synergies. *The Curriculum Journal*, 16(2), 207–223. <https://doi.org/10.1080/09585170500136093>
- Helmke, A. (1989). Affective student characteristics and cognitive development: Problems, pitfalls, perspectives. *International Journal of Educational Research*, 13(8), 915–932. [https://doi.org/10.1016/0883-0355\(89\)90073-6](https://doi.org/10.1016/0883-0355(89)90073-6)
- Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964a). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. Longman.
- Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964b). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Longman.
- Kurniati, K., Widodo, R., & Budiono, B. (2018). Peranan Guru Pkn Dalam Pembentukan Kedisiplinan Siswa Di Man Malang 1. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 163. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8657>
- Lestari, S. A. (2021). Pengaruh mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap sikap ideologi pancasila mahasiswa. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 445–454. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian (33rd ed.)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiana, & Suyata, P. (2017). Evaluating

- The Philosophical Foundation of 2013 Curriculum. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 21(2), 175–188. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/pep.v21i2.13336>.
- Marniati, N. (2018). *Implementasi Penilaian Afektif dalam Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman (Doctoral dissertation)*, Universitas Negeri Padang.
- Marzano, R. J. (2006). *Classroom assesment % grading that work*. Association for Supervision and Curriculum Development.
- McCoach, D. B., Gable, R. K., Madura, J. P., McCoach, D. B., Gable, R. K., & Madura, J. P. (2013). Defining, Measuring, and Scaling Affective Constructs. In *Instrument Development in the Affective Domain (3rd Editio)*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7135-6>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2022). Realisasi citizenship education melalui program kampus merdeka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 68–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p68-76>
- Noviansyah, A. (2020). Objek Assesment, Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam* Volume, 1(2), 136–149. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/3832/2780>
- Rizqiani, A., & Wijayanti, T. (2022). Implementasi Penilaian Ppkn Di Sma Negeri 1 Bumiayu Kabupaten Brebes. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(2), 132–139. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i2.58873>
- Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2), 166-178. <https://doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173>
- Singer, A. J., Maureen Murphy, S., & Hines, M. (2003). *Teaching to learn, Learning to teach: A Handbook for Secondary School Teacher*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Subandi. (2014). Pengembangan kurikulum 2013 (Studi analitis dan substantif kebijakan kurikulum nasional). *Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*; 1(1), 18–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/terampil.v1i1.1302>
- Tyler, R. W. (1972). *Assessing Educational Achievement in the Affective Domain. NCME Measurement in Education. Vol. 4, No. 3, Spring, 1973*. <http://eric.ed.gov/?q=Ralph+W.+Tyler&ft=on&ff1=autTyler%2C+Ralph+W.&id=ED099394>
- Ulumudin, I., & Fujianita, S. (2019). The implementation of attitude assessment in Curriculum 2013 at elementary schools. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 23(1), 46–56. <https://doi.org/10.21831/pep.v23i1.23391>
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2020). Evaluasi Penialian Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 51–61. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5385>
- Wragg, E. C. (2001). Assessment and Learning in the Secondary School. In *Assessment and Learning in the Secondary School. RoutledgeFalmer*. <https://doi.org/10.4324/9780203277980>
- Pembelajaran dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 2016. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.